

LAPORAN KEUANGAN

**BAGIAN ANGGARAN 018
TAHUN ANGGARAN 2019**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

2019



BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

018.10.0500.239654.KD

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Jl. Ketindan No. 1 Lawang - Malang
JAWA TIMUR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Malang, 31 Desember 2019

Kepala Balai,


Ir. Sumardi Noor, M.Si
NIP. 196401221994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Lain-lain
 - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain
 - F.3. Rekening Pemerintah
 - F.4. Revisi DIPA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Telaah Laporan Keuangan
Lampiran II	: Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Lampiran III	: Berita Acara Rekonsiliasi SAI dengan KPPN setempat Semester II Tahun 2019
Lampiran IV	: Memo Jurnal Penyesuaian
SIMAK BMN	
Lampiran V	: Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2019
Lampiran VI	: Berita Acara Internal Data Barang Milik Negara Semester II Tahun 2019
Lampiran VII	: Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan per 31 Desember 2019
Lampiran VIII	: Rekapitulasi Belanja Modal Semester II Tahun 2019
BENDAHARA PENGELUARAN	
Lampiran IX	: Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Pengeluaran
Lampiran X	: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Periode Semester II Tahun 2019
Lampiran XI	: SSPB terkait Penyetoran Pengembalian Bendahara Pengeluaran
BENDAHARA PENERIMA	
Lampiran XII	: Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Penerimaan
Lampiran XIII	: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Periode Semester II tahun 2019
Lampiran XIV	: SSBP terkait penyetoran Kas di bendahara Penerimaan (PNBP)
LAIN-LAIN	
Lampiran XV	: Rekapitulasi Belanja 526
Lampiran XVI	: DIPA, Revisi DIPA dan POK Semester II Tahun 2019
Lampiran XVII	: SP2D sampai dengan 31 Desember 2019
Lampiran XVIII	: Persetujuan kembali atas Pembukaan Rekening
Lampiran XIX	: SK Pengelola Keuangan
Lampiran XX	: Keragaan SDM (Pegawai) BBPP Ketindan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2019

Kepala Balai,



I. Sumardi Noor, M.Si

NIP. 196401221994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp341.526.199,00 atau mencapai 98,18% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp347.850.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp23.811.303.407,00 atau mencapai 98,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp24.056.124.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp44.385.659.061,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.610.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp44.381.973.346,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.075.715,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.378.403,00 dan Rp44.364.280.658,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp299.441.200,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.429.749.750,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-25.130.308.550,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp42.389.999,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-25.087.918.551,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp45.896.423.278,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-25.087.918.551,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp85.998.723,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.469.777.208,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp44.364.280.658,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	347.850.000,00	341.526.199,00	98,18	389.383.482,00
Jumlah Pendapatan		347.850.000,00	341.526.199,00	98,18	389.383.482,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	6.131.725.000,00	6.026.988.641,00	98,29	5.933.077.007,00
Belanja Barang	B.4.	16.323.894.000,00	16.194.040.766,00	99,20	13.089.769.936,00
Belanja Modal	B.5.	1.600.505.000,00	1.590.274.000,00	99,36	1.610.911.000,00
Jumlah Belanja		24.056.124.000,00	23.811.303.407,00	98,98	20.633.757.943,00

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	2.610.000,00	10.000.000,00
Jumlah Aset Lancar		2.610.000,00	10.000.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	13.890.000.000,00	13.890.000.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	17.176.191.574,00	16.531.177.574,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	28.351.104.615,00	27.318.879.615,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.480.245.000,00	2.480.245.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	173.451.242,00	173.451.242,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-17.689.019.085,00	-14.488.133.296,00
Jumlah Aset Tetap		44.381.973.346,00	45.905.620.135,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	1.004.175.200,00	1.007.075.200,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-1.003.099.485,00	-1.003.848.045,00
Jumlah Aset Lainnya		1.075.715,00	3.227.155,00
Jumlah Aset		44.385.659.061,00	45.918.847.290,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	21.378.403,00	22.424.012,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.378.403,00	22.424.012,00
Jumlah Kewajiban		21.378.403,00	22.424.012,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	44.364.280.658,00	45.896.423.278,00
Jumlah Ekuitas		44.364.280.658,00	45.896.423.278,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		44.385.659.061,00	45.918.847.290,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	299.441.200,00	363.781.300,00
JUMLAH PENDAPATAN		299.441.200,00	363.781.300,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.029.268.316,00	5.935.933.600,00
Beban Persediaan	D.3.	101.283.000,00	264.597.300,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	7.915.783.800,00	7.317.075.989,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	889.613.442,00	883.238.010,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5.539.530.240,00	4.706.390.501,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.542.200.000,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	210.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	3.202.070.952,00	2.925.368.175,00
JUMLAH BEBAN		25.429.749.750,00	22.032.603.575,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-25.130.308.550,00	-21.668.822.275,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	41.899.999,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	9.278.077,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	490.000,00	25.602.682,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		42.389.999,00	16.324.605,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-25.087.918.551,00	-21.652.497.670,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	45.896.423.278,00	21.997.254.145,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-25.087.918.551,00	-21.652.497.670,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	85.998.723,00	11.078.262.616,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	86.965.000,00	11.649.039.750,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-966.277,00	-570.777.134,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	23.469.777.208,00	34.473.404.187,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	44.364.280.658,00	45.896.423.278,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka BBPP Ketindan berusaha untuk :

- a. Meningkatkan kualitas program pelatihan berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan system informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas system pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal secara akurat, kridebel dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- d. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- e. Meningkatkan kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermanfaat;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system administrasi dan manajemen.

Program BBPP Ketindan mengacu pada Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) kegiatan yaitu : (a). Penataan dan pemantapan kelembagaan pelatihan; (b). Peningkatan profesionalisme ketenagaan pelatihan pertanian; (c). Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan (d). Peningkatan kualitas program dan kerjasama pelatihan. Untuk mencapai tujuan dan program tersebut maka BBPP Ketindan mempunyai visi dan misi. Visi BBPP Ketindan adalah "Menjadi lembaga pelatihan berkualitas untuk mewujudkan SDM pertanian yang professional dan berdaya saing". Sedangkan misi BBPP Ketindan adalah :

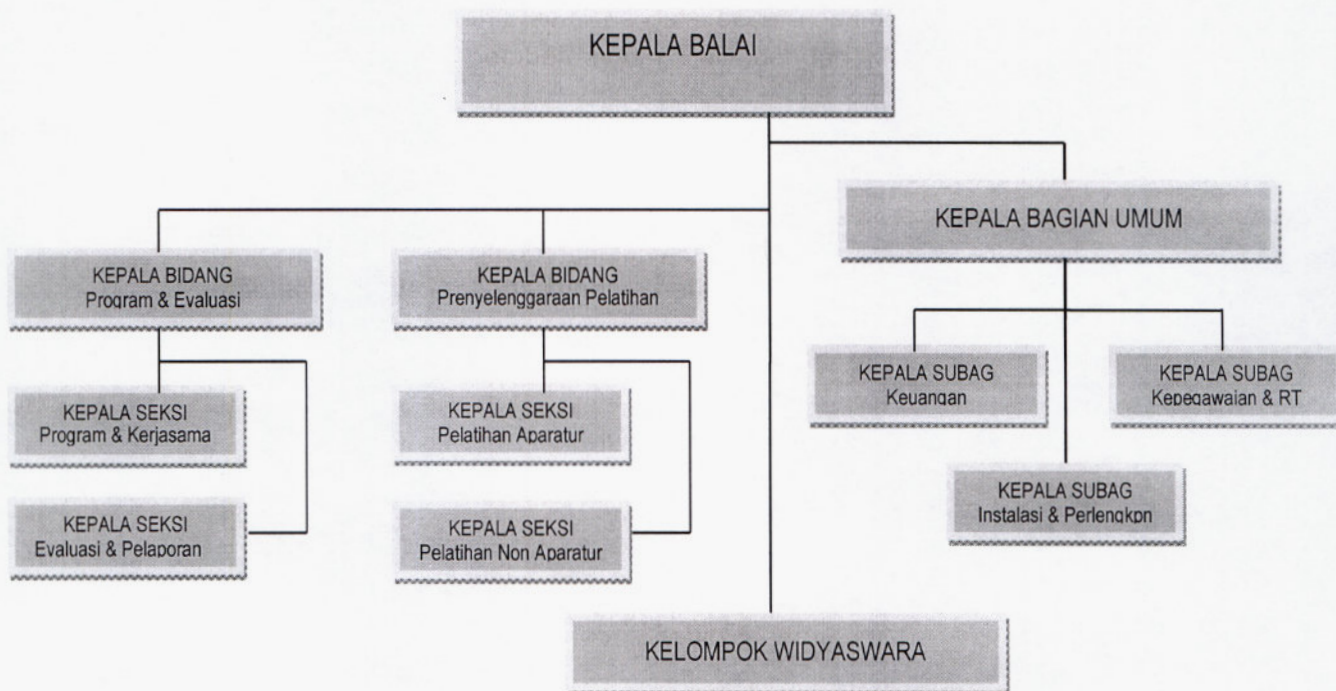
1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
2. Mengembangkan system pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kridibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan SKK dan SKKNI;
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan SKK dan SKKNI yang berdaya saing;

5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usaha tani;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dan promosi terutama bagi instalasi yang prospektif dan sudah pernah bekerjasama dengan pihak BBPP Ketindan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh BBPP Ketindan dalam rangka mewujudkan visi dan misi adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Standarisasi Mutu Pelayanan Kediklatan melalui akreditasi Lembaga Pelatihan menuju ISO 14001:2004 dan ISO 17025, peningkatan ISO 9001:2018;
- Peningkatan sarana dan prasarana Balai secara optimal;
- Pengembangan dan pemberdayaan P4S dengan klasifikasi, pembinaan dan penguatan P4S;
- Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan dengan peningkatan profesionalisme widyaiswara dan petugas melalui magang, workshop, seminar, kajian dalam dan luar negeri;
- Sertifikasi tenaga kediklatan melalui MOT dan TOC;
- Pemantapan system pelatihan berbasis kompetensi yang mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan dengan system CBT sesuai SKK dan SKKNI.

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setor Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	220.470.000,00	220.470.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	127.380.000,00	127.380.000,00
Jumlah Pendapatan	347.850.000,00	347.850.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.131.725.000,00	6.131.725.000,00
Belanja Barang Operasional	1.677.510.000,00	2.053.062.000,00
Belanja Barang Non Operasional	4.549.004.000,00	4.658.407.000,00
Belanja Barang Persediaan	58.720.000,00	93.958.000,00
Belanja Jasa	1.076.600.000,00	1.334.380.000,00
Belanja Pemeliharaan	929.894.000,00	889.412.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.460.298.000,00	5.541.540.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	330.000.000,00	407.760.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	1.345.375.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	654.901.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	945.604.000,00
Jumlah Belanja	21.713.751.000,00	24.056.124.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp341.526.199,00 atau mencapai 98,18% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp347.850.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	220.470.000,00	307.691.199,00	139,56
Pendapatan Lain-lain	0,00	185.000,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	127.380.000,00	33.650.000,00	26,42
Jumlah	347.850.000,00	341.526.199,00	98,18

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -12,29% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	307.691.199,00	363.781.300,00	-15,42
Pendapatan Lain-lain	185.000,00	25.602.182,00	-99,28
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	33.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah	341.526.199,00	389.383.482,00	-12,29

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp23.811.303.407,00 atau 98,98% dari anggaran belanja sebesar Rp24.056.124.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6.131.725.000,00	6.026.993.944,00	98,29
Belanja Barang	16.323.894.000,00	16.194.040.766,00	99,20
Belanja Modal	1.600.505.000,00	1.590.274.000,00	99,36
Total Belanja Kotor	24.056.124.000,00	23.811.308.710,00	98,98
Pengembalian Belanja		-5.303,00	0.00
Total Belanja	24.056.124.000,00	23.811.303.407,00	98,98

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,40% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan disebabkan adanya beberapa orang pegawai yang mengalami kenaikan pangkat/golongan serta kenaikan jabatan fungsional sehingga mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan disisi lain, pada tahun 2019 terdapat 4 orang pegawai yang purna tugas, 1 orang pegawai meninggal dunia dan 1 orang pegawai mutasi yaitu Kabid Program dan Kerjasama dan hingga laporan ini diselesaikan belum ada penggantinya. Gambaran kondisi kepegawaian BBPP Ketindan bulan Desember 2019 yaitu pegawai dengan pangkat Gol I : 1 orang, Gol II : 9 orang, Gol III : 51 orang, Gol IV : 18 orang sedangkan posisi bulan Desember 2018 yaitu Gol I : 1 orang, Gol II : 12 orang, Gol III : 54 orang, Gol IV : 18 orang
2. Belanja barang mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah realisasi peserta pelatihan yaitu 3.152 orang ditahun 2018 sedangkan ditahun 2019 terealisasi sejumlah 3.492 orang.
3. Belanja modal mengalami penurunan disebabkan belanja modal pada tahun 2019 yaitu senilai Rp. 1.600.505.000 lebih efisien dalam realisasi dibanding pagu tahun 2018 yaitu senilai Rp. 1.611.376.000 walaupun realisasi fisik belanja modal tahun 2019 meliputi enam kegiatan renovasi gedung dan bangunan, dua kegiatan belanja kendaraan operasional, empat kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, dua pengadaan sarana laboratorium dan satu pengadaan peralatan pengolah data dan informasi.

**Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	6.026.988.641,00	5.933.077.007,00	1,58
Belanja Barang	16.194.040.766,00	13.089.769.936,00	23,72
Belanja Modal	1.590.274.000,00	1.610.911.000,00	-1,28
Total Belanja	23.811.303.407,00	20.633.757.943,00	15,40

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.026.988.641,00 dan Rp5.933.077.007,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,58% dari TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat 23 orang pegawai dan kenaikan gaji berkala 49 orang pegawai. Sedangkan di tahun 2018 kenaikan pangkat terjadi pada 13 orang pegawai dan 35 orang pegawai. (terlampir)

**Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.026.993.944,00	5.933.263.261,00	1,58
Jumlah Belanja Kotor	6.026.993.944,00	5.933.263.261,00	1,58
Pengembalian Belanja Pegawai	-5.303,00	-186.254,00	-97,15
Jumlah Belanja	6.026.988.641,00	5.933.077.007,00	1,58

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.194.040.766,00 dan Rp13.089.769.936,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,72% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja operasional disebabkan oleh meningkatnya belanja keperluan perkantoran untuk kegiatan operasional balai, operasional instalasi perkantoran dan eksploitasi kendaraan

2. Menurunnya belanja barang non operasional lainnya disebabkan efektifitas dalam penyelenggaraan sehingga untuk optimalisasi dalam pemanfaatan anggaran dialokasikan ke belanja modal
3. Menurunnya belanja barang persediaan disebabkan menurunnya penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan di balai karena target sasaran pelatihan banyak teralokasikan penyelenggaraannya di lokasi asal peserta.
4. Meningkatnya belanja jasa disebabkan meningkatnya penyerapan jasa profesi baik jasa narasumber maupun praktisi pada kegiatan pelatihan maupun non pelatihan
5. Meningkatnya belanja barang pemeliharaan disebabkan karena pemeliharaan asrama kedelai yang mengalami banyak perbaikan
6. Meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri disebabkan intensitas perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi, penyelenggaraan pelatihan/Bimtek di kabupaten dan pemantauan penyelenggaraan pelatihan/Bimtek sebagai akibat dari program/kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan baik berupa uang maupun barang.
7. Meningkatnya belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda karena munculnya program kebijakan strategis Kementerian yang harus dilaksanakan oleh satker
8. Meningkatnya belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda karena munculnya program kebijakan strategis Kementerian yang harus dilaksanakan oleh satker

**Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.041.505.433,00	1.687.327.235,00	20,99
Belanja Barang Non Operasional	4.544.923.770,00	4.663.652.521,00	-2,55
Belanja Barang Persediaan	93.958.000,00	185.401.500,00	-49,32
Belanja Jasa	1.332.679.881,00	963.760.669,00	38,28
Belanja Pemeliharaan	889.243.442,00	883.237.510,00	0,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.539.530.240,00	4.706.390.501,00	17,70
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	407.745.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.344.455.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	16.194.040.766,00	13.089.769.936,00	23,72
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	16.194.040.766,00	13.089.769.936,00	23,72

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.590.274.000,00 dan Rp1.610.911.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -1,28% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja modal peralatan dan mesin disebabkan pemenuhan kebutuhan mobilitas koordinasi dan konsolidasi dalam rangka program kebijakan strategis kementerian dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga memerlukan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat dan dua.
2. Meningkatnya belanja modal gedung dan bangunan disebabkan pembangunan gerai sebagai media promosi dan pembelajaran Agribisnis Pertanian serta laboratorium, asrama, ruang rapat dan rumah dinas.
3. Menurunnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebagai akibat tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal, irigasi dan jaringan dibandingkan tahun 2018.

**Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.014.000,00	341.291.000,00	88,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	945.260.000,00	846.467.000,00	11,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	423.153.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.590.274.000,00	1.610.911.000,00	-1,28
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.590.274.000,00	1.610.911.000,00	-1,28

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp645.014.000,00 dan Rp341.291.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 88,99% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk eselon II dan kendaraan operasional roda dua
2. Pengadaan peralatan perkantoran berupa gorden, vitras, meja dan kursi rapat, meja kepesertaan dan AC
3. Pengadaan sarana laboratorium berupa mesin blender dan bak cetak
4. Pengadaan pengolah data dan informasi berupa LCD projector

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.014.000,00	341.291.000,00	88,99
Jumlah Belanja Kotor	645.014.000,00	341.291.000,00	88,99
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	645.014.000,00	341.291.000,00	88,99

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp945.260.000,00 dan Rp846.467.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,67% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan nilai gedung dan bangunan sebagai akibat munculnya Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan untuk renovasi penambahan mutu gerai, renovasi rumah dinas, laboratorium proteksi, asrama gandum dan ruang rapat (Ganesha).

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	945.260.000,00	846.467.000,00	11,67
Jumlah Belanja Kotor	945.260.000,00	846.467.000,00	11,67
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	945.260.000,00	846.467.000,00	11,67

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.610.000,00 dan Rp10.000.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	2.610.000,00	10.000.000,00
Jumlah	2.610.000,00	10.000.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.890.000.000,00 dan Rp13.890.000.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.176.191.574,00 dan Rp16.531.177.574,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	16.531.177.574,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	645.014.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	17.176.191.574,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-14.807.979.284,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.368.212.290,00

Mutasi transaksi penambahan berupa pembelian kendaraan bermotor, peralatan fasilitas perkantoran, sarana dan prasarana laboratorium, serta peralatan pengolahan data dan informasi.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.351.104.615,00 dan Rp27.318.879.615,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	27.318.879.615,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	945.260.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	86.965.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	28.351.104.615,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-2.389.888.895,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	25.961.215.720,00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa renovasi rumah dinas senilai Rp. 205.450.000, renovasi gerai senilai Rp. 161.330.000, renovasi laboratorium Rp. 207.240.000, renovasi asrama senilai Rp. 193.630.000, ruang rapat Ganesha senilai Rp. 138.960.000 dan renovasi ruang kepesertaan senilai Rp. 38.650.000,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.480.245.000,00 dan Rp2.480.245.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp173.451.242,00 dan Rp173.451.242,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-17.689.019.085,00 dan Rp-14.488.133.296,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17.176.191.574,00	-14.807.979.284,00	2.368.212.290,00
2.	Gedung dan Bangunan	28.351.104.615,00	-2.389.888.895,00	25.961.215.720,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.480.245.000,00	-80.908.178,00	2.399.336.822,00
4.	Aset Tetap Lainnya	173.451.242,00	0,00	173.451.242,00
Akumulasi Penyusutan		48.180.992.431,00	-17.689.019.085,00	30.491.973.346,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.004.175.200,00 dan Rp1.007.075.200,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.007.075.200,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-2.900.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.004.175.200,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1.003.099.485,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.075.715,00

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-1.003.099.485,00 dan Rp-1.003.848.045,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1.004.175.200,00	-1.003.099.485,00	1.075.715,00
Akumulasi Penyusutan		1.004.175.200,00	-1.003.099.485,00	1.075.715,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.378.403,00 dan Rp22.424.012,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	5.136.268,00	2.856.593,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	16.242.135,00	19.567.419,00
Jumlah	21.378.403,00	22.424.012,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.364.280.658,00 dan Rp45.896.423.278,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp299.441.200,00 dan Rp363.781.300,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBП Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	33.150.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	215.725.000,00	323.950.000,00	-33,41
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	41.433.000,00	29.288.000,00	41,47
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.633.200,00	10.543.300,00	-18,12
Jumlah	299.441.200,00	363.781.300,00	-17,69

1. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah pendapatan Negara bukan pajak yang berasal dari kerjasama kegiatan pelatihan.
2. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya adalah pendapatan Negara bukan pajak yang berasal dari jasa wisata pertanian.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi adalah PNBП dari pendapatan hasil panen unit instalasi balai dimana menurun dari tahun sebelumnya karena hasil panen dari beberapa komoditas pertanian mengalami kegagalan
4. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya merupakan PNBП dari hasil lelang peralatan.
5. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan adalah PNBП dari hasil pendapatan sewa gedung dan asrama pelatihan.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.029.268.316,00 dan

Rp5.935.933.600,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.203.504.840,00	4.110.950.840,00	2,25
Beban Pembulatan Gaji PNS	58.549,00	57.100,00	2,54
Beban Tunj. Anak PNS	106.125.428,00	100.087.792,00	6,03
Beban Tunj. Beras PNS	224.791.680,00	229.571.400,00	-2,08
Beban Tunj. Fungsional PNS	303.650.000,00	295.280.000,00	2,83
Beban Tunj. PPh PNS	21.793.939,00	18.040.548,00	20,81
Beban Tunj. Struktural PNS	109.875.000,00	109.755.000,00	0,11
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	363.820.880,00	347.100.920,00	4,82
Beban Tunjangan Umum PNS	113.510.000,00	125.955.000,00	-9,88
Beban Uang Makan PNS	582.138.000,00	599.135.000,00	-2,84
Jumlah	6.029.268.316,00	5.935.933.600,00	1,57

1. Beban gaji pokok PNS mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya kenaikan pangkat 23 orang pegawai dan kenaikan gaji berkala 49 orang pegawai.
2. Beban pembulatan gaji mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya karena hasil penggenapan dari aplikasi gaji (GPP).
3. Beban tunjangan anak PNS mengalami kenaikan karena penambahan jumlah tanggungan anak PNS.
4. Beban tunjangan beras PNS mengalami penurunan karena adanya satu orang pegawai meninggal di bulan Agustus 2019.
5. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami kenaikan disebabkan naiknya beberapa orang fungsional ke jenjang kepangkatan fungsional yang lebih tinggi.
6. Beban tunjangan PPh PNS mengalami kenaikan disebabkan beberapa pegawai yang mengalami kenaikan pangkat yang berimbas pada kenaikan tunjangan PPhnya.
7. Beban tunjangan struktural mengalami kenaikan diakibatkan kenaikan gaji PNS pada tahun 2019.
8. Beban tunjangan suami/istri mengalami kenaikan diakibatkan kenaikan gaji beberapa pegawai yang berimbas pada kenaikan tunjangan istri/suami.

9. Beban tunjangan umum PNS mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya disebabkan beberapa pegawai berlalih fungsi dari tenaga fungsional umum menjadi tenaga fungsional tertentu.
10. Beban uang makan PNS menurun dibanding tahun sebelumnya disebabkan intensitas pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan dikarenakan kegiatan pelatihan banyak dilakukan luar balai.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp101.283.000,00 dan Rp264.597.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	101.283.000,00	264.597.300,00	-61,72
Jumlah	101.283.000,00	264.597.300,00	-61,72

Beban persediaan barang konsumsi mengalami penurunan disebabkan menurunnya anggaran persediaan barang konsumsi dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.915.783.800,00 dan Rp7.317.075.989,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	3.948.567.770,00	3.867.677.521,00	2,09
Beban Barang Non Operasional Lainnya	286.166.000,00	419.725.000,00	-31,82
Beban Barang Operasional Lainnya	824.412.000,00	492.791.730,00	67,29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	112.440.000,00	106.600.000,00	5,48

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Honor Output Kegiatan	310.190.000,00	376.250.000,00	-17,56
Beban Jasa Lainnya	45.100.000,00	17.600.000,00	156,25
Beban Jasa Profesi	760.250.000,00	604.300.000,00	25,81
Beban Keperluan Perkantoran	1.100.573.433,00	1.085.056.805,00	1,43
Beban Langganan Listrik	221.372.458,00	215.432.026,00	2,76
Beban Langganan Telepon	5.632.139,00	13.164.207,00	-57,22
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.080.000,00	2.878.700,00	41,73
Beban Sewa	297.000.000,00	115.600.000,00	156,92
Jumlah	7.915.783.800,00	7.317.075.989,00	8,18

1. Beban bahan mengalami peningkatan dikarenakan kenaikan volume bahan-bahan keperluan pelatihan seperti bahan praktek, ATK dan konsumsi.
2. Beban barang non operasional lainnya mengalami penurunan disebabkan barang non operasional lainnya untuk kebutuhan pelatihan tidak terserap seluruhnya seperti P3K karena pelaksanaan pelatihan secara parallel sehingga cukup membelanjakan 1 paket dalam kegiatan yang parallel tersebut.
3. Beban barang operasional lainnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu karena kenaikan operasional instalasi lahan praktek, laboratorium dan perkantoran sebagai akibat meningkatnya jumlah pelatihan teknis pertanian
4. Beban Honor Operasional Satuan Kerja meningkat dibanding tahun lalu disebabkan realisasi honor untuk P2K pada tahun 2019 penuh 12 bulan sedangkan untuk tahun 2018 hanya 10 bulan. Hal ini disebabkan pegawai yang menjabat P2K mengalami mutasi pada bulan Oktober 2018.
5. Beban Jasa Lainnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan tariff surveillance ISO 9001.2015 dari PT. TUV mengalami kenaikan.
6. Beban Jasa Profesi mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan jumlah pelatihan yang meningkat mengakibatkan beban jasa profesi untuk narasumber dan praktisi menjadi meningkat
7. Beban Keperluan Perkantoran sedikit mengalami kenaikan disebabkan kenaikan beberapa harga dalam rangka keperluan sehari-hari perkantoran, langganan internet dan honor petugas satpam, pengemudi dan pramubakti.
8. Beban Langganan Listrik mengalami kenaikan sehubungan dengan intensitas penggunaan listrik dalam rangka proses pelatihan yang dilaksanakan pada malam hari dan penambahan peralatan yang membutuhkan beban listrik seperti AC dan alat pengolahan data.
9. Beban Langganan Telpn mengalami penurunan disebabkan menurunnya penggunaan telpn sebagai akibat meningkatnya teknologi informasi seperti Whatsapp yang digunakan untuk sarana komunikasi dan koordinasi.
10. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah pelatihan sehingga pengiriman surat dinas ke instansi peserta pelatihan menjadi meningkat.

11. Beban Sewa mengalami peningkatan dikarenakan pola pelatihan yang pada tahun 2018 menggunakan pola 1 hari kunjungan lapangan. Pada tahun 2019 pola pelatihan berubah menjadi 2 hari praktek uji kompetensi di lapangan pada lokasi yang berbeda sehingga beban sewa kendaraan menjadi meningkat.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp889.613.442,00 dan Rp883.238.010,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	415.758.000,00	368.810.000,00	12,73
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	423.085.942,00	469.775.010,00	-9,94
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	50.769.500,00	44.653.000,00	13,70
Jumlah	889.613.442,00	883.238.010,00	0,72

1. Beban pemeliharaan mengalami peningkatan dikarenakan jumlah pemeliharaan meningkat meliputi pemeliharaan asrama melati, ruang kantor, kelas tapak liman, kelas padi, lab biotek, ruang perpustakaan, gedung arsip, garasi dan wisma kacang tanah.
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin menurun disebabkan beberapa peralatan dan mesin sudah tidak tereplotasi karena rusak berat dan dalam rencana dilakukan proses penghapusan.
3. Beban persediaan bahan pemeliharaan mengalami kenaikan karena meningkatnya bahan persediaan yang dianggarkan untuk direalisasikan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.539.530.240,00 dan Rp4.706.390.501,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.862.782.747,00	2.697.723.942,00	6,12
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.546.300.112,00	62.980.000,00	2.355,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.130.447.381,00	1.945.686.559,00	-41,90
Jumlah	5.539.530.240,00	4.706.390.501,00	17,70

1. Beban perjalanan biasa mengalami kenaikan dikarenakan adanya program kementerian pertanian berupa pengawalan dan pendampingan UPSUS.
2. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota meningkat disebabkan meningkatnya jumlah pelatihan yang dalam hal ini digunakan untuk membiayai perjalan peserta, narasumber dan praktisi pelatihan.
3. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota menurun dibanding tahun sebelumnya disebabkan efisiensi petugas pendamping saat praktek lapangan dimana kegiatan lapangan yang parallel dapat ditangani beberapa petugas saja.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.752.200.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	536.980.000,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	210.000.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	197.745.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	807.475.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.752.200.000,00	0,00	0,00

1. Beban barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat berupa pakan ayam, obat dan vitamin ayam bagi bagi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya *(terlampir)*
2. Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa biaya pembuatan kandang ayam bagi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. *(terlampir)*
3. Beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa peralatan pembelajaran bagi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). *(terlampir)*
4. Beban persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa ayam bagi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. *(Terlampir)*

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.202.070.952,00 dan Rp2.925.368.175,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.560.242.991,00	1.036.658.047,00	50,51
Beban Penyusutan Irigasi	54.173.918,00	43.466.044,00	24,64
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	219.321.234,00	128.054.136,00	71,27
Beban Penyusutan Jaringan	19.105.388,00	15.355.388,00	24,42
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.151.440,00	3.401.330,00	-36,75
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.347.075.981,00	1.698.433.230,00	-20,69
Jumlah	3.202.070.952,00	2.925.368.175,00	9,46

1. Beban penyusutan gedung dan bangunan bertambah karena renovasi bangunan antara lain rumah dinas, gerai, laboratorium, asrama, ruang rapat dan ruang kepesertaan.
2. Baban penyusutan irigasi bertambah disbanding tahun lalu dikarenakan hasil koreksi bertambah dari dampak inventarisasi dan penilaian kembali.
3. Beban penyusutan jalan dan jembatan bertambah karena pengaspalan dan koreksi bertambah dampak dari inventarisasi dan penilaian kembali.
4. Beban penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah berkurang di sebabkan menurunnya jumlah aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
5. Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan karena turunnya nilai peralatan dan mesin sebagai akibat mengalami masa penyusutan.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-9.278.077,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	305.000,00	500,00	60.900,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	41.899.999,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	25.602.182,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000,00	0,00	0,00
Jumlah	42.389.999,00	16.324.605,00	159,67

1. Beban kerugian pelepasan aset mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu karena tidak adanya kerugian pelepasan aset pada tahun 2019.
2. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan meningkat disbanding tahun lalu disebabkan perbedaan harga atas pembelian barang yang sama.
3. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin bertambah karena beberapa peralatan dan mesin sudah terjadi pelelangan dan disetorkan ke Negara sejumlah Rp.41.899.99,-

4. Tidak ada penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu pada tahun 2019.
5. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa setoran tunjangan umum PNS atas nama Imam Fatullah dikarenakan pengangkatannya sebagai pejabat struktural.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp45.896.423.278,00 dan Rp21.997.254.145,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-25.087.918.551,00 dan Rp-21.652.497.670,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp85.998.723,00 dan Rp11.078.262.616,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp86.965.000,00 dan Rp11.649.039.750,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	86.965.000,00
Jumlah	86.965.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-966.277,00 dan Rp-570.777.134,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-966.277,00
Jumlah	-966.277,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp23.469.777.208,00 dan Rp34.473.404.187,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.811.303.407,00
Diterima dari Entitas Lain	-341.526.199,00
Jumlah	23.469.777.208,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-341.526.199,00 sedangkan DKEL sebesar Rp23.811.303.407,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.364.280.658,00 dan Rp45.896.423.278,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Terdapat pergantian Eselon II yaitu Kepala Balai sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 191/KPTS/KP.230/M/7/20019 tanggal 29 Juli 2019 sehingga terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (terlampir)
2. Susunan Pengelola Keuangan BBPP Ketindan TA 2019 (terlampir)

F.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah

No.	Nomor Rekening	Atas Nama Rekening	Bank	Saldo Rekening
1.	144-00-1174792-7	BPG 032 BBPP Ketindan (239654)	Bank Mandiri KCP Lawang	Rp. 0,00
2.	144-00-1523463-3	BPN 032 BBPP Ketindan (239654)	Bank Mandiri KCP Lawang	Rp. 0,00

F.4. REVISI DIPA

KRONOLOGIS REVISI I ANGGARAN TAHUN 2019

1. Pemotongan anggaran sebesar Rp. 206.138.000,- yang diambilkan dari output Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian
2. Berkurangnya target peserta pelatihan dari 3.386 orang menjadi 2.733 orang dimana anggaran juga berkurang sebesar Rp. 1.344.676.000,- dari Rp. 8.564.395.000,- menjadi Rp. 7.219.719.000,-
3. Bertambahnya target peserta sertifikasi dari 330 orang menjadi 540 orang tetapi ada penurunan anggaran dari Rp. 990.000.000,- menjadi Rp. 810.000.000,-
4. Pengurangan target output Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani dari 32 unit sebesar Rp. 640.000.000,- menjadi 20 unit sebesar Rp. 400.000.000,-
5. Penambahan anggaran pada output Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan dari Rp. 1.941.476.000,- menjadi Rp. 2.232.266.000,-
6. Penambahan anggaran pada output Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang semula Rp. 799.151.000,- menjadi Rp. 1.648.249.000,- yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium, rehabilitasi rumah dinas, dan penambahan mutu gerai
7. Penambahan anggaran pada output Layanan Perkantoran yang semula Rp. 9.018.729.000,- menjadi Rp. 9.197.379.000,-

KRONOLOGIS REVISI II ANGGARAN TAHUN 2019

Penambahan target output pada Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian sebanyak 700 orang yaitu dari 2.733 orang menjadi 3.433 orang dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.681.831.000,- yaitu dari Rp. 21.507.613.000,- menjadi Rp. 24.056.124.000,- yang diperuntukkan untuk kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi KSTM di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Kota Surabaya

KRONOLOGIS REVISI III ANGGARAN TAHUN 2019

1. Optimalisasi anggaran sebesar Rp. 1.244.153.000,- yang diambilkan dari output Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian sebesar Rp. 634.153.000, Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani sebesar Rp. 110.000.000,- dan Belanja Bahan Pelatihan Vokasi sebesar Rp. 500.000.000,-
2. Bertambahnya target peserta pelatihan 60 orang dari 3.433 orang menjadi 3.493 orang dimana penggunaan PNPB yang semula berada di output Layanan Sarana Prasarana Internal berpindah ke output Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian.
3. Penambahan anggaran pada output Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan dari Rp. 2.232.266.000,- menjadi Rp. 2.726.558.000,-
4. Penambahan anggaran pada output Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang semula Rp. 1.648.249.000,- menjadi Rp. 1.790.110.000,- yang digunakan untuk renovasi laboratorium proteksi, renovasi ruang ganesha, renovasi ruang kesekretariatan dan renovasi asrama gandum.
5. Penambahan anggaran sebesar Rp. 108.000.000,- pada output Layanan Perkantoran yang semula Rp. 9.197.379.000,- menjadi Rp. 9.305.379.000,-

KRONOLOGIS REVISI IV ANGGARAN TAHUN 2019

1. Revisi perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dengan tidak merubah total belanja satker dan/atau total penerimaan satker yang tercantum dalam DIPA
2. Perubahan pejabat pembendaharaan karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran

KRONOLOGIS REVISI V ANGGARAN TAHUN 2019

Revisi perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dengan tidak merubah total belanja satker dan/atau total penerimaan satker yang tercantum dalam DIPA .

KRONOLOGIS REVISI VI ANGGARAN TAHUN 2019

Revisi dalam hal pemutakhiran data yaitu revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah POK dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L (adanya pergeseran anggaran dalam satu output) pada Kementerian Keuangan.